

Analisis Terhadap Program Bantuan Sosial, Jaminan Sosial Dan Subsidi Di Kabupaten Tabalong

Ida Hastutiningsih

Universitas Cahaya Bangsa, Banjar, Kalimantan Selatan

Abidin

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Muhammad Husni

STIT Syech Muhammad Nafis Tabalong, Kalimantan Selatan

Norlailah

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Andini Putri Titasari

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan

Abstract

The problem of inaccuracies in target recipient data still occurs in many regions in Indonesia. This is often complained of by the community and is one of the causes of the ineffectiveness of social assistance, social security, and subsidies that have been provided in alleviating poverty. The purpose of writing this article is to analyze the number of poor people and their welfare status based on the October 2020 DTKS data, to map the types and numbers of recipients of social assistance and Social Security and Subsidies in Tabalong Regency, and to analyze the database used for targeting beneficiaries. social security and social security and subsidies in Tabalong Regency. The method used is descriptive exploratory with a qualitative approach through FGD, interviews, comparative studies, and secondary data collection and processing. From the results of the recapitulation and analysis of the data obtained, it is known that there are various social assistance, social security, and subsidies received by the community in Tabalong Regency but there are different databases in determining target recipients in each sector. In addition to differences in the database, another difference found was the difference in the criteria for beneficiaries. So, to improve poverty reduction programs in Tabalong Regency, it is necessary to coordinate and synchronize in determining the criteria for the poor and develop a "One Poverty Data" system that can integrate all existing social assistance, social security, and subsidies programs.

Keywords: *Poverty, Poverty Data, Database.*

Abstrak

Permasalahan ketidakakuratan data penerima sasaran masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. Hal ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat dan menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yang telah diberikan dalam menanggulangi kemiskinan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis jumlah penduduk miskin dan status kesejahteraannya berdasarkan data DTKS Oktober 2020, melakukan pemetaan terhadap jenis dan jumlah penerima bantuan sosial dan Jaminan Sosial serta Subsidi di Kabupaten Tabalong serta menganalisis basis data yang digunakan untuk penentuan sasaran penerima bantuan-bantuan sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui FGD, wawancara, kaji banding serta pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Dari hasil rekapitulasi dan analisis terhadap data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat beragam bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong namun terdapat basis data yang bervariasi dalam penentuan penerima sasaran di tiap sektor. Selain perbedaan basis data, perbedaan lain yang ditemukan adalah perbedaan kriteria penerima bantuan. Sehingga untuk memperbaiki program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penentuan kriteria masyarakat miskin serta pengembangan suatu sistem "Satu Data Kemiskinan" yang dapat mengintegrasikan semua program bantuan sosial, jaminan sosial maupun subsidi yang ada.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Data Kemiskinan, Basis Data.*

A. Pendahuluan

Meskipun telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin namun keluhan bahwa "*ada masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan*" atau sebaliknya "*ada masyarakat yang tergolong mampu masih menerima bantuan*" masih seringkali terdengar di masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh peserta *focus group discussion* yang dilakukan oleh Tim Penulis bersama dengan Koordinator PKH beserta 3 orang perwakilan pendamping PKH, TKSK Kecamatan sebanyak 3 orang, Koordinator BPNT, Pengelola Rasda, Pengelola DTKS dan Pengelola SLRT Kabupaten Tabalong. Mereka menyatakan bahwa secara garis besar ada 2 (dua) permasalahan besar terkait dengan sasaran penerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Permasalahan **Pertama** Masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) padahal DTKS merupakan basis data untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial/jaminan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT. Untuk mengatasinya Dinas Sosial kabupaten Tabalong telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial masyarakat miskin yang belum masuk

DTKS untuk dapat dimasukan DTKS namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diakomodir oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi dari Koordinator PKH Kabupaten Tabalong hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan/tidak ditemukannya NIK KPM yang diusulkan ke DTKS dengan data NIK yang tercatat di Dukcapil Pusat.

Permasalahan **Kedua** Masih ada masyarakat yang sudah dapat digolong berkecukupan masih menjadi penerima PKH atau BPNT. Untuk mengatasi hal tersebut pendamping PKH telah berupaya melakukan pendekatan *persuasive* kepada masyarakat yang sudah mampu tersebut agar mau graduasi sebagai KPM PKH. Namun kendala yang dihadapi di lapangan adalah (1) Tidak semua KPM PKH yang sudah mampu mau graduasi sebagai KPM PKH dengan alasan *sayang bantuan dari pemerintah ditolak*; (2) Tidak semua Kepala Desa/tokoh masyarakat dalam Musdes mau meng-graduasi-kan KPM PKH secara paksa meskipun sudah dirasa tidak miskin lagi; dan (3) Kemampuan pendamping PKH untuk melakukan pendekatan *persuasive* agar KPM PKH mau graduasi masih kurang.

Permasalah ketidakakuratan data sasaran program penanggulangan kemiskinan memang masih terjadi di banyak tempat di Indonesia, sehingga seringkali menimbulkan keluhan masyarakat dan ketidakefektifan dalam upaya pengentasan kemiskinan (Rahmansyah et al., 2020). Hal senada juga ditemukan dalam beberapa penelitian di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dan Gobel (2015) tentang efektifitas bansos KUBE di Palu dan Bolaang Mangondaw Selatan. Hasil penelitian ke-2nya menyebutkan bahwa kurang efektifnya bansos KUBE di ke-2 lokasi penelitian dikarenakan ketidaktepatan data sasaran. Ketidaktepatan sasaran untuk subsidi LPG 3 kg juga didapatkan dari hasil penelitian di Kelurahan Tembalang Semarang (Pamaria Hendri S, Margaretha S, 2009). Sebuah penelitian lainnya yang dilakukan di Kecamatan Kanigaran Probolinggo sudah menemukan kurang efektifnya penyaluran BPNT dikarenakan data KPM yang belum akurat, di mana masih ada keluarga mampu yang menjadi KPM dan mendapatkan bantuan sebaliknya masih ada keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak tercantum sebagai KPM (Kurniawan, 2020)

Penelitian oleh Barany dkk (2020) menyebutkan bahwa cakupan penerima bantuan sosial ekonomi di tengah pandemic COVID 19 belum menjangkau semua penduduk yang rentan dikarenakan banyak penduduk yang menjadi miskin/rentan miskin selama pandemi

tidak termasuk dalam DTKS yang hanya mengakomodir 40% penduduk dengan pendapatan terendah berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014) juga menemukan hal yang sama yaitu tidak efektifnya Program PKH di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan penentuan sasaran yang belum tepat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis jumlah penduduk miskin dan status kesejahteraannya berdasarkan data DTKS Oktober 2020.
2. Melakukan pemetaan terhadap Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial serta Subsidi di Kabupaten Tabalong bersumber dana APBN, APBD 1, APBD 2 dan Dana Desa 2021.
3. Menganalisis basis data yang digunakan untuk penentuan sasaran penerima bantuan bantuan sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong.

B. Kajian Pustaka

Data kemiskinan di Indonesia umumnya dibedakan menjadi 2 yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Istilah data makro atau data *aggregate* dan data mikro atau data tingkat individu merujuk pada bagaimana suatu data disajikan, misal, jika ada data sensus, maka yang disebut data makro antara lain jumlah individu menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Sedangkan, data mikro terdiri dari data yang mengandung informasi individu.

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Tidak semua masyarakat yang termasuk di dalam DTKS otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS.

DTKS merupakan data mikro yang digunakan untuk *household targeting* untuk program perlindungan sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS11) (Rivani, 2016; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2019).

Sedangkan data kemiskinan makro disajikan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya sejak 1984 dengan menggunakan Susenas sebagai sumber data (Syawie, 2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia terdiri dari (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; (4) Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 maka Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia terdiri dari (1) Program Bantuan Sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; (2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; (3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin (Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Basis Data Terpadu berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahtraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 25 juta rumah tangga atau sekitar 92 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahtraannya. Di setiap daerah, jumlah penduduk yang masuk dalam BDT berbeda-beda, tergantung kepada tingkat kemiskinan masing-masing daerah. Di provinsi/kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, tentu jumlah Rumah Tangga (RT) dalam BDT juga akan lebih rendah dibandingkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan sebaliknya.

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui Focus Group Discussion dan wawancara serta pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Untuk memperoleh masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan juga dilakukan kunjungan lapang dan diskusi dengan Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk memperoleh masukan tentang pengelolaan data kemiskinan di Kota Balikpapan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Jumlah Penduduk Miskin dan Status Kesejahteraan berdasarkan DTKS Oktober 2020

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (update Oktober 2020) saat ini merupakan data kemiskinan terbaru yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI. Jumlah total masyarakat miskin yang terdapat dalam DTKS adalah 21,33% atau 54.022 jiwa (17.961 KK). Kecamatan dengan persentase penduduk terbanyak DTKS adalah Kecamatan Banua Lawas sebesar 54,72% atau 11.054 jiwa disusul oleh Kecamatan Pugaan sebesar 50,93% atau 3.791 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan persentase terendah adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu sebesar 5,32% atau 3.020 jiwa.

Sebaran jumlah Rumah Tangga dan Jiwa penduduk miskin di Kabupaten Tabalong selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tabalong

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk BPS	DTKS	
			Jiwa	%
1	Banua Lawas	20.201	11054	54,72
2	Pugaan	7.443	3791	50,93
3	Kelua	24.911	7938	31,87
4	Muara Harus	6.795	2357	34,69
5	Tanta	22.168	3652	16,47
6	Tanjung	35.899	5295	14,75
7	Murung Pudak	56.790	3020	5,32
8	Haruai	23.688	4937	20,84
9	Bintang Ara	9.146	2106	23,03
10	Upau	7.366	1270	17,24
11	Muara Uya	23.839	5504	23,09
12	Jaro	15.059	3098	20,57
		253.305	54.022	21,33

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (update Oktober 2020)

Jumlah ini tentu saja berbeda dengan data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 5,72% pada tahun 2020 atau sejumlah 14.695 jiwa karena data BPS adalah data kemiskinan makro yang diukur berdasarkan *basic need approach* atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Status kesejahteraan tiap keluarga dalam DTKS dikategorikan menjadi 5 yaitu sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan menuju *middle class*. Berdasarkan *crosstabulasi analysis* DTKS terhadap Status Kesejahteraan dan Kecamatan yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 17.961 KK miskin di Kabupaten Tabalong dengan kategori 1.041 KK (5,8%) sangat miskin, 2.286 KK (12,7%) miskin, 3.074 KK (17,1%) hampir miskin, 5.668 KK (31,6%) rentan miskin dan 5.892 KK (32,8%) menuju *middle class*.

Dalam pemberian bantuan sosial, jaminan sosial ataupun subsidi, penting untuk memastikan bahwa masyarakat dengan status kesejahteraan sangat miskin sampai rentan miskin benar – benar mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan di skema APBN maka APBD harus menyediakan dana untuk meng-cover-nya.

Hasil *crosstabulasi analysis* selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 : Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Status Kesejahteraan

		status_kesejahteraan					Total
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Menuju Middle Class	
KDKEC	Banua Lawas	263	541	613	1026	894	3337
	Pugaan	64	175	234	388	273	1134
	Kelua	99	307	468	813	898	2585
	Muara Harus	19	83	139	269	301	811
	Tanta	50	133	214	395	505	1297
	Tanjung	128	211	259	549	616	1763
	Murung Pudak	26	85	135	336	496	1078
	Haruai	74	190	292	542	705	1803
	Bintang Ara	115	133	119	175	120	662
	Upau	28	61	80	142	175	486

	Muara Uya	108	245	348	644	554	1899
	Jaro	67	122	173	389	355	1106
Total		1041	2286	3074	5668	5892	17961

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Oktober 2020)

Jika melihat status kesejahteraan ini, seyogianya hanya penduduk yang berada pada status kesejahteraan sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskinlah yang menerima bantuan, sedangkan penduduk dengan status kesejahteraan menuju *middle class* meskipun masih termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidaklah layak untuk masih menerima bantuan.

2. Mapping Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial serta Subsidi di Kabupaten Tabalong bersumber dana APBN, APBD 1, APBD 2 dan Dana Desa 2021

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 53 tahun 2020, salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah dalam bentuk pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Bantuan sosial sifatnya sementara dengan maksud agar masyarakat miskin dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya mengurangi beban hidup masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

a. Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebut dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat untuk keluarga dan/atau seseorang yang kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir

miskin dan diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditunjuk sebagai keluarga penerima.

Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Bantuan diberikan berupa uang tunai yang disalurkan ke rekening masing – masing KPM sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh keluarga. Penentuan sasaran menggunakan basis data DTKS. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Tabalong tahun 2021 sebanyak 5.961 KK.

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial NOMOR 5 TAHUN 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang dimaksud dengan BPNT adalah Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong. Bentuk bantuan berupa bahan pangan senilai Rp. 200.000,-/bulan.

Untuk Kabupaten Tabalong tahun 2021, sasaran penerima BPNT adalah Rumah Tangga Kurang Mampu sebanyak 10.478 KPM. Berdasar Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Penentuan sasaran menggunakan DTKS sebagai basis data.

c. Kartu Pra Kerja

Melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Pemerintah memberikan pelatihan kerja serta insentif bagi mereka pekerja yang terdampak pandemi COVID 19 dengan kriteria WNI berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang menempuh program Pendidikan. Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif

sebesar Rp. 600.000 selama 4 bulan. Pendaftaran lewat situs resmi di <https://dashboard.prakerja.go.id/>.

d. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan COVID 19. BST merupakan bansos yang dikeluarkan Kementerian Sosial dalam masa PPKM darurat. Besaran BST senilai Rp300 ribu yang disalurkan oleh PT Pos ke penerima bantuan. Penerima BST di Kabupaten Tabalong tahun 2021 berjumlah 3.211 KK.

e. Bantuan Pangan Daerah/Beras Daerah

Sasaran pemberian bantuan sosial Bantuan Sosial Pangan Daerah adalah masyarakat miskin yang tidak merupakan KPM PKH dan BPNT. Pemberian bantuan didasarkan pada SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/115/2021 tanggal 3 maret 2021 tentang penetapan nama-nama penerima bantuan sosial pangan daerah pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten sub kegiatan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga dinas sosial di kabupaten Tabalong tahun 2021. Bentuk bantuan berupa beras 20 kg dan 12 biji telur itik per bulan. Penentuan sasaran pemberian bantuan menggunakan DTKS dan Usulan Desa. Penerima bantuan pangan daerah di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 berjumlah 3.245 KK.

f. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 maka dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada warga desa miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan Kartu Prakerja (Permendes PDTT, 2020). Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- per keluarga selama 12 bulan. Penentuan sasaran penerima bantuan ditentukan melalui musyawarah desa. Penerima BLT Dana Desa pada tahun 2021 berjumlah 14.344 KK.

g. Subsidi LPG 3 Kg

Subsidi LPG 3 Kg diberikan dalam bentuk keringanan harga khusus untuk LPG Tabung 3 kg. Harga di penyalur atau agen ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Permen ESDM No 28/2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro dan Keputusan Menteri ESDM 7436.K/12/MEM/2016 sedangkan harga di pangkalan/sub penyalur berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk harga jual eceran LPG 3 kg di titik serah adalah sebesar Rp 4.250/kg atau Rp. 12.750/tabung yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, Peraturan Menteri 28/2008 tentang UMKM dan Keputusan Menteri ESDM 7436.K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual LPG Tabung 3 Kg Untuk keperluan kapal perikanan bagi nelayan kecil. Penerima subsidi LPG 3 kg rumah tangga di Kabupaten Tabalong tahun 2021 berjumlah 15.673 KK. Di Kabupaten Tabalong, OPD yang bertanggung jawab terhadap distribusi LPG 3 Kg adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

h. Subsidi Listrik

Subsidi listrik diberikan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29.L/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pemberian Stimulus tarif tenaga listrik konsumen PT. PLN (Persero) dalam rangka menghadapi dampak Covid 19.

Sesuai dengan Kepmen ESDM tersebut pada tahun 2021 subsidi diberikan dalam bentuk potongan 50% untuk pelanggan dengan daya 450 watt dan 25% untuk pelanggan dengan daya 900 watt.

Dari hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari Unit Layanan Pelanggan Tanjung dan Amuntai untuk Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 diperoleh hasil sebanyak total 35.471 pelanggan terdiri dari 30.930 pelanggan atau 87,2% dengan daya 450 watt dan 4.164 pelanggan atau 12,8% dengan daya 900 watt.

i. Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Kurang Mampu

Dalam APBD Perubahan 2021 telah dialokasikan 75 paket bantuan Pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu sebesar Rp.2.500.000 per mahasiswa.

Sasaran penerima bantuan adalah berdasarkan seleksi terhadap pemohon sesuai dengan persyaratan.

j. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas

Sasaran adalah disabilitas yang tidak bisa direhabilitasi, tidak mampu didik dan mampu latih. bentuk bantuan tunai Rp. 300.000/perbulan selama setahun (12 bulan) melalui rekening walinya. SK Kepala Dinas Sosial Nomor 188.4/834/SOSIAL/2021 tentang penetapan penerima asistensi sosial bagi penyandang disabilitas cacat berat dan non produktif di kecamatan kabupaten Tabalong tahun 2021.

Penerima bantuan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 berjumlah 118 orang.

k. Bantuan Sosial Bencana Alam dan Kebakaran

Pada tahun 2021 dialokasikan sebanyak 13 paket bantuan untuk korban kebakaran/bencana sebesar Rp. 8.000.000/rumah. Penentuan sasaran penerima bantuan adalah berdasarkan usulan desa.

l. Bantuan Asistensi Sosial Usia Lanjut Terlantar

Diberikan kepada lansia terlantar sebanyak 739 Orang sesuai SK kepala Dinas Sosial Nomor 188.4/800/KEP/SOSIAL/2021 tentang Penetapan penerima dana bantuan asistensi sosial usia terlantar, bentuk bantuannya berupa uang Rp.200.000/bulan selama 12 bulan melalui rekening walinya.

m. Bantuan Susu/PMT/Vitamin untuk anak stunting

1) Dinas Sosial

Bantuan berupa vitamin dan susu, diberikan kepada balita stunting sebanyak 30 orang anak per kecamatan dengan sumber pendanaan dari APBD. Penentuan sasaran penerima bantuan melalui data yang disampaikan oleh KPM desa.

2) Dinas Kesehatan

➤ APBD

Bantuan berupa snack (telur, kudapan, buah) diberikan kepada semua balita stunting di desa lokus stunting selama 15 hari. Total alokasi dana Rp. 160.500.000,-.

➤ APBN

Kementerian kesehatan memberikan PMT berupa biskuit yang diberikan kepada semua balita stunting. Basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan adalah e-pggbm.

n. *Universal Health Coverage (UHC)*

Sasaran penerima bantuan ini adalah seluruh penduduk ber KTP Tabalong terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dana APBN pada tahun 2021 berjumlah 53.360 jiwa. Sedangkan penerima bantuan iuran dari Program UHC Tabalong adalah berjumlah 74.232 jiwa.

Dasar pemberian bantuan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun basis data yang digunakan untuk penentuan sasaran penerima bantuan untuk PBI APBN adalah DTKS, sedangkan untuk penerima bantuan bersumber dana APBD 2 adalah data disdukcapil.

o. PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Diberikan APBD pada bumil KEK pada desa lokus stunting selama 15 hari (telur, kue, kudapan). Sasaran Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil sebanyak 457 orang. Pada kegiatan ini semua Ibu Hamil KEK diberikan PMT. PMT diberikan dalam bentuk biskuit. Dasar pemberian bantuan adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Basis data untuk penentuan sasaran adalah hasil laporan Puskesmas.

p. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1) RS- Rutilahu (Dinas Sosial)

RS-Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS-Rutilahu beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala keluarga untuk satu kelompok masyarakat miskin yang tinggal berdekatan. RS-Rutilahu dilaksanakan dalam satu kelompok dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

Basis data yang digunakan untuk penentuan penerima bantuan adalah berdasarkan usulan desa. Bantuan yang diberikan di Kabuapten Tabalong untuk tahun 2021 :

- APBD 1 sebanyak 6 buah @ Rp. 25.000.000
- APBD 2 sebanyak 10 buah @ Rp.15.000.000,-

2) Stimulan Perumahan Swadaya

Dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Basis data yang digunakan untuk penentuan penerima bantuan adalah berdasarkan usulan desa. Bantuan yang diberikan pada tahun 2021 :

- APBD 2 sebanyak 50 buah @17.500.000,- berlokasi di luar kawasan kumuh (Surat Keputusan Kepala Dinas Perkimtan Nomor 15/Disperkimtan/08/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Berupa Uang Kab Tabalong 2021).
- Dana sisa DAK berlokasi kawasan kumuh sebanyak 76 buah @20.000.000 (Surat Keputusan Kepala Dinas Perkimtan Nomor 18/Disperkimtan/09/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Berupa Uang Kab Tabalong 2021).

q. Bantuan Sosial Anak Terlantar

Dasar pemberian bantuan adalah SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/112/2021 tentang Penetapan Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Penerima Bantuan Sosial Bagi Anak Terlantar dalam dan luar panti. Bantuan diserahkan dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk pemberian makanan dan minuman anak panti sebesar Rp.20.000/anak selama 365 hari.

Sasaran penerima bantuan pada tahun 2021 berjumlah 574 anak yang berada di 10 Panti Asuhan di Kabupaten Tabalong.

Rekapitulasi penerima bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi di Kabupaten Tabalong tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah (KK/Jiwa) Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana APBN Dan APBD I Tahun 2021

Kecamatan	PKH 2021	BPNT 2021	Subsidi LPG 3 KG Rumah Tangga	PBI JKN	Kartu Pra Kerja	Subsidi Listrik (Pelanggan)	BST	Rutilahu APBD I (Rumah)	Stimulan Perumahan Swadaya (sisa dana DAK)	BLT Dana Desa (KK)	Program Indonesia Pintar		Biskuit	
											SD	SMP	Balita Stunting	Bumil KEK
Banua Lawas	1.361	2.343	2951	11.371	Data tidak tersedia	4.329	164	3	60	2.158	782	112	134	35
Bintang Ara	219	380	603	2.625		1040	101			1.582	249	74	111	21
Haruai	307	680	1447	4.489		3517	273			1.178	516	64	131	50
Jaro	387	652	952	3.702		2616	149			415	333	61	119	21
Kelua	863	1.492	2225	7.355		4.957	597	2	16	2.643	687	172	186	51
Muara Harus	308	510	716	2.162		1.379	84			228	222	31	53	15
Muara Uya	723	1.160	1700	5.475		3853	157			524	571	165	323	46
Murung Pudak	267	551	960	2.682		3536	705			312	378	66	266	71
Pugaan	372	727	1057	3.404		1.402	155	1		637	214	43	78	29
Tanjung	562	1003	1595	4.860		4603	671			672	644	126	235	74
Tanta	458	743	1092	3.818		2779	116			2.832	463	69	126	35
Upau	134	237	375	1.417		1460	39			1.163	169	52	51	11
Total	5.961	10.478	15.673	53.360		35.471	3211	6	76	14.344	5228	1035	1.859	459

Sumber : berbagai sumber

Tabel 4 : Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial Bersumber Dana APBD II Tahun 2021

No	Kecamatan	Penyandang Disabilitas (jiwa)	Lansia (jiwa)	Bantuan Pangan Daerah(KK)	JKN APBD 2	Anak Terlantar (panti/ana k)	Kebakaran (Rumah)	Rutilahu APBD II (Rumah)	Stimulan Perumahan Swadaya	PMT Stunting (Anak)		PMT Bumil KEK
										Dinsos	Dinkes	
1	Banua Lawas	7	82	529	4.813		1		9	30	Semua balita stunting di desa lokus stunting	Semua Bumil KEK di desa lokus stunting
2	Bintang Ara	15	28	192	3.918			1		30		
3	Haruai	22	114	435	9.941	1/61		1		30		
4	Jaro	4	24	262	6.354	1/70		1		30		
5	Kelua	8	101	381	7.379	1/80	6		4	30		
6	Muara Harus	5	16	89	2.279			1		30		
7	Muara Uya	16	84	391	10.956		3	1	9	30		
8	Murung Pudak	14	30	128	8.016	4/245		1	6	30		
9	Pugaan	4	41	197	2.228			1		30		
10	Tanjung	10	132	339	10.193	3/118	2	1	1	30		
11	Tanta	4	29	213	5.202			1	7	30		
12	Upau	9	58	89	2.953		1	1	14	30		
	Jumlah	118	739	3245	74.232	10/574	13	10	50	360		

Sumber : berbagai sumber

3. Basis data yang digunakan untuk penentuan sasaran penerima bantuan bantuan sosial dan jaminan sosial serta subsidi di Kabupaten Tabalong.

Basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial, jamian sosial dan subsidi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 : Rekapitulasi Basis Data Untuk Menentukan Sasaran Penerima Bantuan Sosial/Jaminan Sosial/Subsidi Bersumber Dana Apbn Dan Apbd Di Kabupaten Tabalong

No	OPD Pengampu	Program/Kegiatan	Basis Data Untuk Menentukan Sasaran	Sumber Dana
1	Dinas Sosial	1. Program Keluarga Harapan	DTKS	APBN
		2. Bantuan Pangan Non Tunai	DTKS	APBN
		3. Bantuan Sosial Tunai	DTKS	APBN
		4. Bansos Pangan Daerah	DTKS/Usulan Desa	APBD
		5. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Perorangan	Usulan Desa	APBD
		6. Paket Sembako Fakir Miskin	Usulan Desa	APBD
		7. Rehab Rutilahu	Usulan Desa	APBD
		8. Rehab Rumah Rawan Bencana	Usulan Desa	APBD
		9. Bantuan Disabilitas	Usulan Desa	APBD
		10. Bantuan Lansia	Usulan Desa	APBD
		11. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Miskin	Seleksi Usulan	APBD
		12. KUBE	Usulan Desa	APBD
		13. RS-RTLH	Usulan Desa	APBD I & APBD II
2	PLN	Subsidi Listrik	Otomatis Untuk R1 Dan R1T Daya 450 Dan 900	APBN
2	Dinas Kesehatan	1. PMT Stunting	E-Ppgmb	APBN, APBD II
		2. UHC	Disdukcapil	APBD
		3. PMT Bumil KEK	Laporan Puskesmas	APBD, APBD II
3	Dinas Pendidikan	Program Indonesia Pintar	Usulan Sekolah	APBN
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Subsidi LPG 3 Kg	Kartu Kendali Didistribusikan Oleh Desa/RT (Kuota)	APBN
5	Dana Desa	BLT	Musyawarah Desa	APBN
6	Perkim	Stimulan Perumahan Swadaya	Usulan Desa	APBD II, DAK

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial, jaminan sosial maupun subsidi di Kabupaten Tabalong masih sangat bervariasi yaitu DTKS, musyawarah desa, usulan desa, usulan sekolah dan lainnya. Perbedaan basis data tersebut juga berakibat perbedaan kriteria masyarakat miskin penerima bantuan. Basis data dan kriteria penerima bantuan yang bervariasi tentu saja berakibat luasnya spektrum penerima bantuan dan terkadang justru belum menjangkau semua masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan. Luasnya spektrum penerima bantuan juga berakibat kurang tajamnya daya ungkit program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tabalong. Perbedaan basis data yang digunakan dalam penentuan sasaran program kemiskinan merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan (Sudibyo, 2019).

Pentingnya informasi mengenai siapa yang miskin dan di mana mereka berada menjadi sangat penting dan akan menjadi modal dasar dalam *targeting* rumah tangga miskin. Dengan kata lain, agar program penanggulangan kemiskinan berhasil dan tepat sasaran, maka ketersediaan data kemiskinan yang terpercaya merupakan suatu keharusan (Rivani, 2016) (Rivani, 2016) (Ferezagia, 2018) (Barany et al., 2020).

Selain itu untuk menciptakan akurasi data sasaran penerima program/kegiatan pengentasan kemiskinan, perlu juga dilakukan menyatukan data dalam penetapan masyarakat miskin (Sudibyo, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Giyarsih (2014) menyimpulkan bahwa salah satu kelemahan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Nunukan adalah belum terintegrasikannya berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai dinas/instansi sektoral yang ada, masing – masing instansi yang berperan dalam pengentasan kemiskinan berjalan sendiri – sendiri sehingga di satu sisi sering terjadi overlapping program dan sebaliknya ada beberapa kelompok masyarakat miskin yang tidak tersentuh oleh program penanggulangan kemiskinan. Kurangnya koordinasi juga dilaporkan sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru (Lubis et al., 2020)

Sekretaris Dinas Sosial Kota Samarinda pada sambutannya dalam kunjungan *Tim Policy Brief* Satu Data Kemiskinan dan Tim Dinas Sosial Kabupaten Tabalong menyatakan bahwa selain koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, di Kota

Samarinda juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan sasaran program/kegiatan kemiskinan serta penentuan kriteria masyarakat miskin.

Di Kabupaten Tabalong telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan telah secara rutin melakukan rapat-rapat koordinasi terkait program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong namun sampai saat ini memang belum dilakukan sinkronisasi dan penyatuan data sasaran program/kegiatan.

Pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi merupakan bagian dari jaring pengaman sosial nasional dan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan pemberian bantuan dan subsidi tersebut diharapkan masyarakat miskin tidak makin terpuruk di dalam jurang kemiskinan. Namun demikian, meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan, kunci kesuksesan program ini berada pada komunikasi, kerja sama, koordinasi, sinergisme fungsional dan harmonisasi *multi-stakeholder* (Gobel, 2015) (Rahmansyah et al., 2020) (Barany et al., 2020) (Fadilah, 2016) (Giyarsih, 2014). Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang terintegrasi sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan (Rahmansyah et al., 2020).

E. Kesimpulan

Jumlah total masyarakat Tabalong yang termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial 2020 adalah 21,33% atau 54.022 jiwa (17.961 KK). Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Kecamatan Banua Lawas sebesar 54,72% atau 11.054 jiwa disusul oleh Kecamatan Pugaan sebesar 50,93% atau 3.791 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan persentase terendah adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu sebesar 5,32% atau 3.020 jiwa.

Status Kesejahteraan masyarakat berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial terdiri dari 5,8% atau 1.041 KK dengan status kesejahteraan sangat miskin, 12,7% atau 2.286 KK dengan status kesejahteraan miskin, 17,1% atau 3.074 KK dengan status kesejahteraan hampir miskin, 5.668 KK atau 31,6% dengan status kesejahteraan rentan miskin dan 5.892 KK atau 32,8% dengan status kesejahteraan menuju middle class.

Dari hasil rekapitulasi terhadap jenis bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi bersumber dana APBN terdapat PKH, BPNT, Subsidi LPG 3 kg, PBI JKN, Kartu Pra Sejahtera,

Subsidi Listrik, BST, stimulan perumahan swadaya, BLT Dana Desa, Program Indonesia Pintar, PMT balita stunting dan ibu hamil KEK. Sedangkan yang bersumber APBD I yaitu RS-Rutilahu. Untuk yang bersumber dari APBD II yaitu bantuan sosial penyandang disabilitas, lansia, bantuan pangan daerah, universal health coverage, bantuan sosial anak terlantar, bantuan sosial korban bencana, RS Rutilahu, stimulant perumahan swadaya, PMT untuk balita stunting dan ibu hamil KEK.

Dari analisis terhadap data penerima bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat bahwa terdapat berbagai macam program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh multi sektor, baik yang bersumber dana APBD II, APBD I maupun APBN dengan jumlah sasaran yang cukup banyak. Namun demikian basis data yang dipakai untuk menentukan sasaran penerima bantuan dan subsidi juga sangat bervariasi. Selain basis data yang berbeda, tiap sektor juga menggunakan kriteria penduduk miskin yang berbeda. Ke-2 hal ini disebutkan dalam banyak referensi sebagai penyebab ketidakefektifan program penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengatasi terjadinya ketidaktepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong dan meningkatkan efektifitasnya maka Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergisme multi sektor yang berperang dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Koordinasi dan sinergisme tidak hanya terhadap program dan kegiatan juga terkait data sasaran program/kegiatan yang dilakukan serta penentuan kriteria masyarakat miskin.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu membuat suatu sistem terpadu "Satu Data Kemiskinan" yang :
 - a) Memungkinkan setiap sektor terkait dapat mengakses data kemiskinan yang sama sehingga sasaran intervensi kegiatan yang dilakukan oleh tiap sektor bisa tepat sasaran.
 - b) Mempunyai *web public* sehingga juga dapat menyajikan informasi yang bersifat umum kepada publik sehingga masyarakat secara transparan dapat ikut melakukan monitoring terhadap pemberian bantuan kemiskinan di wilayahnya.
 - c) Mengakomodir data penduduk miskin yang tidak terakomodir dalam DTKS

3. Pemerintah daerah kabupaten tabalong harus tetap menganggarkan bantuan kemiskinan bersumber dari APBD II untuk meng-cover masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan dari skema bantuan lainnya.
4. Perlunya peningkatan kapasitas PPKS khususnya pendamping PKH agar mampu memberikan komunikasi persuasive yang lebih baik sehingga warga masyarakat yang tergolong mampu namun masih mendapatkan bantuan mau *graduasi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?. Centre for Strategic and International Studies, April, 1–11. 2020.*
- Ekardo, A., Firdaus, & Elfemi, N. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, III(1), 12–26. 2014.*
- Fadilah, I. F. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia). Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 12(1). 2016.*
- Ferezagia, D. V. *Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 1, 1–6. 2018.*
- Giyarsih, S. R. *Pengentasan Kemiskinan Yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia - Kasus Kabupaten Nunukan. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 21(2), 239–246. 2014.*
- Gobel, L. Van. *Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, II, 98. 2015.*
- Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020.*
- Kurniawan, A. A. *Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 105(3), 129–133. 2020.*
- Lubis, E. F., Zubaidah, E., Jumlah, P., Pekanbaru, K., Jumlah, T., & Miskin, P. *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 9(2), 88–99. 2020.*
- Pamaria Hendri S, Margaretha S, I. H. D. *Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquefied Petroleum Gas). 2009.*
- Permendes PDPT. *Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.*
- Putra, A. A. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). Katalogis, 6(8), 1–8. 2018*
- Rahmansyah et al. *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COvid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 2(1), 90–102. 2020*
- Rivani, E. *Peran Sumber Data Tunggal Dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Program Percepatan Penganggulan Kemiskinan. Kajian, 21, 87–103. 2016*

- Sudibyo, E. *Strategi Pemerintah dalam Akurasi Pendataan Kemiskinan*. Karta Raharja, 1(1), 33–46. 2019.
- Syawie, M. Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial. *Informasi*, 16(3), 213–219. 2011.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Data Basis Data Terpadu 2011-2019. (B. W. Triantoro & Unit KM TNP2K, Eds.) (Pertama). Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. www.tnp2k.go.id. 2019.
- TNP2K. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. <http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/>. 2018